

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian awal terhadap karya terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti. Selain itu hal ini juga sebagai bahan perbandingan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Prakarsa, 2014, Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dimana hasilnya adalah Belanja Barang dan Jasa (BBJ) yang dalam regresi ini terbukti berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Ini selaras dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kunti Ayu Maharani, yang mana bahwa pengeluaran pemerintah berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dalam hal Belanja Barang dan Jasa yang dilakukan pemerintah memberi pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga semakin besar pengeluaran dalam Belanja Barang dan Jasa yang dilakukan pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pula Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. Secara langsung juga menunjukkan bahwa pengeluaran Belanja Barang dan Jasa Pemerintah sudah dilakukan secara efektif untuk meningkatkan output dari pemerintah daerah itu sendiri.

2. Anasmen, 2009, Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dimana hasilnya adalah Belanja Modal Pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun (2000-2006) tidak sesuai dengan hasil penelitian. Ini berarti, hipotesis penelitian ditolak berdasarkan hasil analisis regresi. Hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah kabupaten/kota tidak berpengaruh cukup besar pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Dari analisis belanja modal Kabupaten/Kota untuk tahun 2000-2006, lebih banyak dialokasikan kepada belanja modal transportasi.
3. Mawarni, 2013, Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan hasilnya pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai beta sebesar 0.335 dengan nilai signifikansi 0.000 artinya DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu untuk belanja modal, hasil pengujian koefisien jalur sub-struktur 2 model 1, pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai t hitung sebesar 1.576 dan dengan nilai signifikansi 0.118 menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang pertumbuhan ekonomi, untuk jurnal yang pertama menggunakan alat analisis regresi linier berganda, jurnal kedua menggunakan regresi linier

berganda dan jurnal ketiga menggunakan regresi linier berganda. Dan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Selain itu variabel dependen dan independen yang digunakan berbeda.

B. Landasan Teori

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan beragam cara antara lain melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman, dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk PDRB, perhitungannya merupakan gambaran total output barang dan jasa dari fungsi input unit-unit produksi yang digunakan pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Dengan pendekatan manapun, nampak bahwa PDRB mampu mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan sehingga wajar apabila PDRB dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat/pembangunan ekonomi daerah. Terdapat dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. (Sukirno, 1996:33)

Menurut Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus, yang menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subisten atau kemandegan. Ricardo menggunakan beberapa asumsi untuk membahas pertumbuhan ekonomi yaitu : 1. Jumlah tanah terbatas; 2. Tenaga kerja akan meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah nominal; 3. Akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang diperoleh para pemilik modal berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka untuk melakukan investasi; 4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu; 5. Sektor pertanian sangat dominan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas. (Arsyad, 1999 : 11)

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi.

Penduduk yang bertambah akan memperbesar tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan menambah produksi, serta dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dan bertambahnya sektor perusahaan pula. (Sukirno, 2010:430)

Perubahan struktural yang terjadi di dalam pembangunan biasanya di tandai oleh perubahan pendapatan perkapita yang diterima oleh masyarakat, pendapatan yang lebih tinggi yang didapatkan masyarakat dikarenakan adanya perubahan struktural, semakin tinggi pendapatan perkapita yang diterimanya masyarakat suatu negara maka akan menggeser peranan sektor pertanian ke sektor lainnya yang menjanjikan tingkat upah yang lebih tinggi, yaitu sektor industri dan sektor jasa sehingga menyebabkan terjaidnya pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. (Todaro, 2003:133)

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) bukan indikator lainnya di antaranya adalah bahwa PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. (Mankiw, 2003)

Dalam konteks ekonomi regional, ukuran yang sering dipergunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sedangkan pendapatan per kapita adalah total pendapatan wilayah/daerah tersebut dibagi dengan jumlah penduduknya untuk tahun yang sama. (Tarigan, 2005)

1. Teori Belanja Modal

Belanja modal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya. (Mahmudi, 2009:96)

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009:67). Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan

minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007).

Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syarif, 2006) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

(Saragih,2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, (Darwanto,2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu. Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah dilkatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur

kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004).

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rinciannya bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Berdasarkan UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu:

- a. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.

- b. Fungsi utama anggaran adalah mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.

Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara. (Nurlan, 2007:142-143)

2. Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. (Kuncoro,2004)

Menurut Nurjoni, bahwa : Tak diragukan lagi, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih menyejahterakan masyarakat. Lebih lanjut Nurjoni menjelaskan bahwa: ”Keterbatasan pembangunan infrastruktur menyebabkan melambatnya laju investasi di tanah air dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sisi lain, harus diakui infrastruktur di Indonesia masih belum bisa meningkatkan daya saing sektor riil” (Nurjoni, 2008)

Dengan program peningkatan belanja modal, mau tak mau menyentuh langsung peningkatan pembangunan beragam infrastruktur, seperti sarana pertanian, transportasi, dan infrastruktur lain yang langsung menopang produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Itu berarti di masa mendatang, semua belanja akan berorientasi ke daerah, karena membangun bangsa adalah pembangunan daerah serta membentuk kapital atau modal yang semakin besar di daerah. Trans-Sumatera, trans-Sulawesi, hingga transKalimantan harus diwujudkan. Untuk kepentingan rakyat, semua itu harus dibesarkan anggarannya. Karena anggaran infrastruktur, sektor pertanian, kesehatan dan transportasi akan dilipatgandakan, biaya operasional, perjalanan dinas, atau pun belanja modal yang tidak produktif harus diturunkan. Itu berarti para birokrat tidak bisa lagi seenaknya bermain-main dengan belanja operasional atau mencatut perjalanan dinas. Yang terpenting, pemerintah sudah memberi isyarat mengenai perubahan orientasi pembangunan. Fokus tidak lagi ke perkotaan, melainkan ke daerah. Infrastruktur akan dilengkapi agar daerah memiliki daya saing untuk menarik modal asing (Anggaran, 2007).

Definisi Infrastruktur, (World Bank, World Development Report, 1994) sebagai jasa-jasa publik (energi listrik, fasilitas air, pekerjaan publik (jalan), dan transportasi yang lain (pelabuhan dan bandar udara). Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat antara belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dalam

kenyataannya tidak selalu bahwa peningkatan belanja pemerintah dalam bidang infrastruktur akan merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya.. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat. (Mankiw, 2003)

Pengeluaran Pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sukirno,2000)

Bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

3. Teori Aset Daerah

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset non keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. (Mahmudi, 2009:146)

Secara umum, aset daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomik yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Karakteristik aset sebagai berikut:

- a. Sumber daya ekonomi tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah.
- b. Sumber daya ekonomi tersebut mempunyai manfaat ekonomik yang cukup pasti dimasa datang.
- c. Manfaat ekonomik di masa datang tersebut dapat diukur dengan tingkat kepastian yang masuk akal.
- d. Sumber daya ekonomi tersebut timbul karena transaksi masa lalu.

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 1) aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (local government used assets), dan 3) aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (surplus property). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Mahmudi (2009:157) Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen aset daerah adalah pemerintah daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahap perencanaan (penentuan anggaran modal), pada saat pembelian, pemanfaatan, rehabilitas, sampai pada saat pembelian, pemanfaatan, rehabilitasi, sampai pada tahap penghapusan aset. Semua tahap tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Prinsip-prinsip manajemen aset daerah yang harus dipenuhi pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengadaan aset tetap harus dianggarkan.
- b. Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi.
- c. Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan/administrasi secara baik.
- d. Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi.

Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang berwujud atau disebut dengan aktiva tetap adalah barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap antara lain terdiri dari tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubelair dan perlengkapan serta bukubuku perpustakaan.

Pentingnya pengelolaan aset terutama tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan keberadaan manusia. Salah satu bentuk pengelolaan aset adalah konsep real property, yaitu suatu hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan berikut bangunan (permanen) yang didirikan di atasnya atau tanpa

bangunan. Pengertian penguasaan di atas perlu dibedakan antara penguasaannya secara fisik atas tanah dan/atau bangunan yang disebut real estate. Sedangkan real property merupakan kepemilikan sebagai konsep hukum (penguasaan secara yuridis) yang dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah. (Siregar, 2004)

Pengelolaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu : inventarisasi, identifikasi, legal audit, dan penilaian yang dilaksanakan dengan baik dan akurat. Sekarang ini, Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. (Siregar, 2004)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintahan untuk mengamankan dan mengoptimalkan asetnya. Sumberdaya manusia adalah pemegang kunci dari semua aktivitas. Banyaknya modal yang berhasil dikumpulkan, akan hilang tanpa makna jika sumberdaya manusia sebagai pengelolanya tidak memiliki kapasitas yang tepat untuk mengurus modal tersebut. (Ishak, 2002:5)

4. Hubungan Aset Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, aset daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomik yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Aset daerah meliputi berbagai infrastruktur, seperti sarana pertanian, transportasi, dan infrastruktur lain yang langsung menopang produktivitas dan kesejahteraan rakyat. (Anasmen:2009)

Infrastruktur akan dilengkapi agar daerah memiliki daya saing untuk menarik modal asing. Infrastruktur menunjang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi jika terjadi peningkatan stok dan perbaikan kualitas infrastruktur (“RAPBN 2008”)

Pada dasarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan mencerminkan kepincangan dalam distribusi harta (aset), baik harta fisik maupun harta non fisik. Kedua jenis harta ini dapat menghasilkan pendapatan (income-earning assets), sehingga semakin banyak “harta” yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula pendapatannya. Dengan demikian, pola distribusi pendapatan yang sangat timpang mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup parah dalam distribusi hartanya. (Arsyad, 2010:206)

Jika distribusi harta sangat menentukan distribusi pendapatan, maka hal ini berarti bahwa upaya pemerataan pendapatan hanya dapat dikerjakan secara efektif melalui upaya pemerataan distribusi harta. Upaya pemerataan

pendapatan mau tidak memerlukan seperangkat kebijakan keras (hard polociess) yang direspresentasikan oleh redistribusi harta, baik harta fisik maupun harta non fisik. (Arsyad, 2010:206)

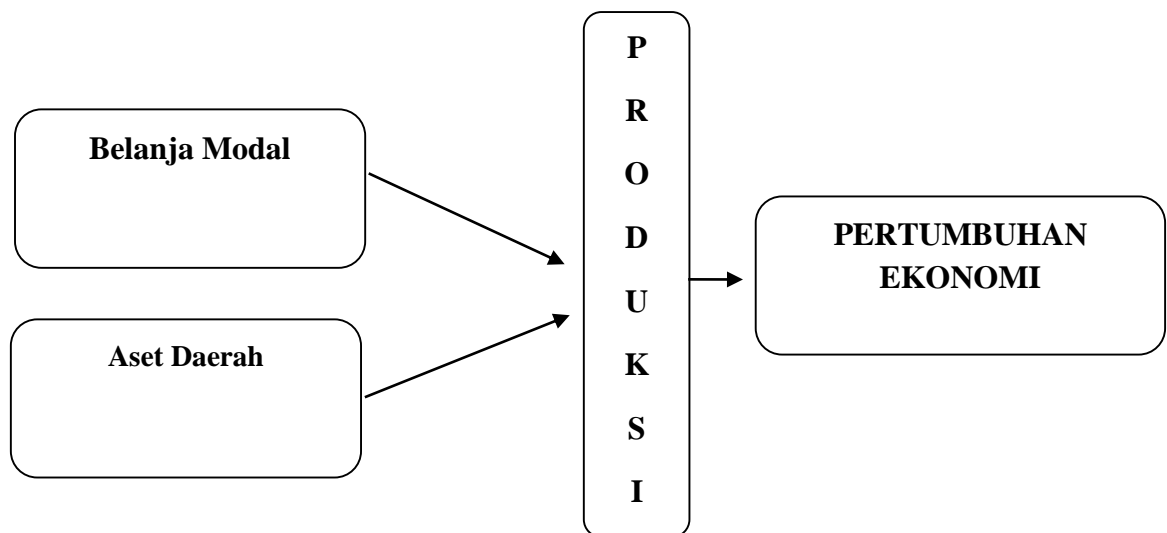
Pengelolaan aset/barang daerah merupakan bagian penting dari keuangan Negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pengaturan tentang barang milik daerah selanjutnya ditetapkan dalam PP No.6/2006 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan pedoman teknis berupa Peraturan Mendagri No.17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan Undang-undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 44, disebutkan bahwa pengguna barang atau aset daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur daerah sangat berperan penting dalam menciptakan manajemen aset yang efektif.

C. Kerangka Pikir

Berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dibuat gambaran umum penelitian berupa Kerangka Pemikiran yaitu variabel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu belanja modal (X1) dan aset daerah

(X2), diharapkan belanja modal mampu meningkatkan aset daerah sehingga dengan adanya peningkatan variabel tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y). Jika belanja modal dimanfaatkan dengan baik maka akan diikuti dengan peningkatan aset daerah ketika aset daerah meningkat diharapkan mampu menarik investor sehingga proses produksi juga akan meningkat. Nilai produksi yang meningkat akan diikuti oleh PDB yang meningkat juga. Dengan adanya kenaikan PDB maka akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga sehingga pengalokasian belanja modal diharapkan akan mengembangkan aset daerah juga sehingga akan diikuti oleh pertumbuhannya juga.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis Penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. (Sugiyono, 2009)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan.

H2: Aset Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan.